

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi, baik instansi swasta maupun pemerintah pasti dihadapkan dengan masalah penggajian. Masalah penggajian ini sangat penting dan membutuhkan penanganan yang baik dan teliti karena masalah penggajian berhubungan langsung dengan sumber daya manusia yang merupakan pelaksana utama kegiatan operasional organisasi. Penanganan yang baik dan teliti terhadap pemberian gaji kepada pegawai akan sesuai dengan jasa dan loyalitas yang telah diberikan. Tidak hanya membuat pegawai tenang dan berkonsentrasi dalam bekerja, pemberian gaji tepat pada waktunya dapat lebih memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pembayaran gaji diperlukan adanya suatu prosedur penggajian yang benar. Tidak hanya di perusahaan swasta, di instansi pemerintah pun juga diperlukan adanya suatu prosedur penggajian yang benar. Meskipun dana yang digunakan untuk pembayaran gaji berasal dari pemerintah pusat, namun dalam proses pencairan dana tersebut juga harus melewati prosedur tertentu yang sudah ditetapkan, sehingga instansi pemerintah juga perlu menerapkan suatu sistem dan prosedur agar pembayaran gaji berjalan dengan baik dan tidak terjadi kekeliruan dalam *update* data pegawai yang mempengaruhi jumlah gaji yang diterima pegawai.

Dalam suatu instansi dimana tingkat pendidikan pegawainya beragam dan jumlah yang tidak sedikit, perlu adanya prosedur yang benar. Karena prosedur penggajian yang tidak benar akan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian gaji, dalam memberikan kenaikan gaji, kenaikan golongan, atau pun kekeliruan dalam perhitungan gaji yang dapat merugikan organisasi maupun pegawai.

Tenaga kerja yang handal sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan, atau ide yang tujuannya untuk menciptakan kemajuan. Namun SPI (Sistem Pengendalian Intern) juga dibutuhkan sebagai *controller* pada pelaksanaan sistem dan prosedur yang dimiliki instansi tersebut, termasuk sistem dan prosedur penggajian. Dengan demikian, SPI diharapkan dapat mencegah permasalahan yang dapat timbul dalam penggajian.

Pengadilan Negeri Pasuruan merupakan salah satu instansi pemerintah di Kotamadya Pasuruan yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 33 orang, terdiri dari 26 orang pegawai tetap, dan 7 orang pegawai honorer. Di Pengadilan Negeri Pasuruan, pembayaran gaji terdiri dari pembayaran gaji induk, tunjangan (remunerasi), dan uang makan.

Jumlah gaji induk yang diperoleh setiap pegawai tetap tergantung pada golongan gaji pegawai tersebut yang dapat berubah pada setiap masa tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa jabatannya. Jumlah tunjangan (remunerasi) dan uang makan dipengaruhi data kehadiran pegawai setiap bulan yang dilakukan secara manual dan juga menggunakan *finger print machine* setiap hari kerja, yaitu pada pagi hari pukul 08.00 dan pukul 16.00 pada saat pulang kantor. Sedangkan untuk pegawai

honorar, jumlah gaji yang diterima setiap bulan ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa mendapatkan tunjangan (remunerasi).

Pengadilan Negeri Pasuruan adalah salah satu instansi pemerintah di Kotamadya Pasuruan yang memiliki sistem dan prosedur penggajian yang sudah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, di Pengadilan Negeri Pasuruan pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji kepada para pegawai. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahpahaman pada salah satu fungsi yang membuat kesalahan pada prosedur pembayaran gaji, sehingga pembayaran gaji di Pengadilan Negeri Pasuruan mengalami keterlambatan selama kurang lebih tujuh hari dan merugikan berbagai pihak, terutama para pegawainya, jadi koordinasi yang baik antarfungsi dalam sistem penggajian dalam melaksanakan semua prosedur yang ada sangat penting untuk menghindari permasalahan dan kendala yang mungkin bisa saja terjadi. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penulis memilih judul “SISTEM DAN PROSEDUR PENGGAJIAN DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN”.

1.2. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap judul dalam Tugas Akhir, penulis memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut

SISTEM

Merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan

PROSEDUR

Merupakan urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

PENGGAJIAN

Suatu pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan, umumnya gaji dibayarkan secara berkala setiap bulan.

PENGADILAN NEGERI PASURUAN

PENGADILAN NEGERI PASURUAN adalah suatu instansi pemerintah yang kegiatan utamanya menangani perkara hukum dalam masyarakat Kota Pasuruan.

1.3. Rumusan Masalah

Oleh karena itu dirumuskan permasalahan berkenaan dengan penerapan sistem penggajian berikut:

“Bagaimana sistem dan prosedur penggajian pada Pengadilan Negeri Pasuruan?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penggajian yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Pasuruan.
2. Sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah dipelajari pada perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya pada Pengadilan Negeri Pasuruan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini antara lain:

1.5.1. Bagi Pengadilan Negeri Pasuruan

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi alternatif pemikiran dalam melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur penggajian yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

1.5.2. Bagi penulis

Sebagai sarana pembanding dan penerapan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan, khususnya dalam hal sistem dan prosedur penggajian.

1.5.3. Bagi pembaca

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai sistem dan prosedur penggajian di Pengadilan Negeri Pasuruan.

1.5.4. Bagi Lembaga Pendidikan STIE Perbanas Surabaya

Menambah perbendaharaan perpustakaan.

1.6. Metode Pengamatan

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Interview

Pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung pada pegawai Pengadilan Negeri Pasuruan, khususnya pada fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem dan prosedur penggajian, yaitu bendahawan gaji dan pengeluaran yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem dan prosedur penggajian di Pengadilan Negeri Pasuruan.

2. Data sekunder

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen dan laporan terkait yang digunakan dalam sistem dan prosedur penggajian pada Pengadilan Negeri Pasuruan, yaitu daftar gaji pegawai, slip gaji, dll.